

BAB II

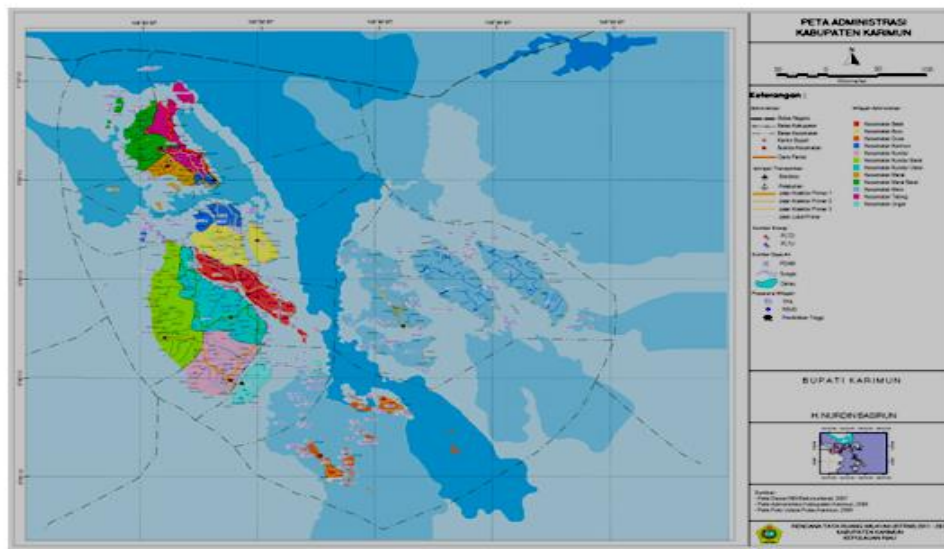
DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Karimun

2.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun adalah salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Kepulauan Riau. Letak geografis Kabupaten Karimun berada pada koordinat $00^{\circ}24'36''$ LU sampai $01^{\circ}13'12''$ LU dan $103^{\circ}13'12''$ BT sampai $104^{\circ}00'36''$ BT dengan wilayah laut yang berada dalam batas wilayah empat mil yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan (Karimunkab, 2016). Wilayah administrasi Kabupaten Karimun terletak diantara 2 selat, 1 semenanjung, 3 Kabupaten dan 1 Kota, yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Selat Singapura, Selat Malaka, dan Semenanjung Malaysia, di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kateman Kabupaten Indra Gili Hilir dan kabupaten Lingga, di sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan tebing tinggi Kabupaten Bengkalis dan Kecamatan Kuala kampar Kabupaten Pelalawan, dan di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Belakang Padang Kota Batam (Karimunkab, 2016).

Berdasarkan aspek geostrategisnya, maka Kabupaten Karimun termasuk kedalam wilayah yang sangat strategis untuk pengembangan kegiatan ekonomi dan menjadi salah satu dari empat kabupaten yang sebagian wilayahnya ditetapkan sebagai kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB atau *Free Trade Zone/FTZ*) (Karimunkab, 2016). Adapun peta wilayah administrasi Kabupaten Karimun di terangkan pada gambar 2.1.



Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Karimun

Sumber: Dokumen Rancangan RTRW Kabupaten karimun 2015 (dalam Karimunkab, 2016)

Secara administratif Kabupaten karimun terdiri dari 12 Kecamatan, 29 Kelurahan, dan 42 Desa dengan Ibukota kabupaten terletak di Tanjung Balai Kecamatan karimun (Karimunkab, 2016). Pembagian wilayah administrasi hingga unit desa/kelurahan dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Karimun Tahun 2015

No	Wilayah Administrasi	Ibukota Kecamatan	Jumlah		Jumlah pulau
			Kelurahan	Desa	
1	Moro	Moro	2	10	84
2	Kundur Utara	Tanjung Berlian	1	4	11
3	Kundur Barat	Sawang	1	4	24
4	Karimun	Tanjung Balai	6	3	23
5	Buru	Buru	2	2	6
6	Meral	Meral	6	-	24
7	Tebing	Tebing	5	1	5
8	Meral Barat	Darussalam	2	2	-
9	Belat	Sebele	-	6	-
10	Ungar	Sei. Buluh	1	3	-
11	Durai	Durai	-	4	46
12	Kundur	Tanjung Batu	3	3	26
Jumlah			29	42	249

Sumber: Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015 (dalam Karimunkab, 2016)

Kabupaten Karimun mempunyai wilayah seluas 7.984 Km² yang terdiri dari 1.524 Km² luas daratan dan 6.460 Km² luas lautan dengan wilayah terluas berada di Kecamatan Moro dengan total wilayah seluas 2.835,4 Km² atau 35,51% (Karimunkab, 2016). Secara umum Kabupaten karimun mempunyai dataran yang datar dan landai dengan ketinggian antara 2 sampai 500 meter dari permukaan laut, namun juga terdapat bagian yang berbukit-bukit dengan ketinggian antara 20 sampai 500 meter (Karimunkab, 2016). Disamping itu, pada beberapa pulau di wilayah Kabupaten Karimun terdapat rawa-rawa, dan dilihat dari keberadaan potensi wilayahnya maka wilayah laut (perairan) Kabupaten Karimun merupakan perairan yang strategis karena sebagian wilayahnya berada pada selat Malaka.

Tabel 2.2
Luas Wilayah Kabupaten Karimun per-Kecamatan

Nama Kecamatan	Luas Wilayah			
	Administrasi		Terbangun	
	(Ha)	(%) terhadap total	(Ha)	(%) terhadap total
Moro	24.073	25,84	23	6,30
Kundur	8.785	9,43	42	11,51
Karimun	3.625	3,89	71	19,45
Meral	2.535	2,72	56	15,34
Tebing	5.171	5,55	33	9,04
Buru	6.646	7,13	13	3,56
Kundur Utara	9.391	10,08	16	4,38
Kundur Barat	13.237	14,21	22	6,03
Durai	3.571	3,83	8	2,19
Meral Barat	5.600	6,01	34	9,32
Ungar	3.658	3,93	23	6,30
Belat	6.865	7,37	24	6,58
Total	93.157	100	365	100

Sumber: Buku Putih Sanitasi Kabupaten Karimun Tahun 2015 (dalam Karimunkab, 2015).

2.1.2 Kondisi Demografis Kabupaten Karimun

Secara demografis, jumlah penduduk Kabupaten Karimun pada tahun 2015 menurut data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun yang mengadakan registrasi penduduk dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) berjumlah 225.866 jiwa (Karimunkab, 2016). Penduduk Kabupaten Karimun berasal dari berbagai suku bangsa dan lebih didominasi oleh suku Melayu (Karimunkab, 2016). Jika dilihat dari struktur usia, lebih dari separuh penduduk berada pada golongan umur 20-59 tahun, selanjutnya diikuti golongan umur terbesar kedua adalah umur 5-19 tahun, sedangkan untuk golongan umur diatas 59 tahun merupakan kelompok umur yang paling sedikit dari total penduduk ditahun 2015 (Karimunkab, 2016). Adapun jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dijelaskan didalam tabel berikut:

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2015

No	Kelompok Usia	2015	Persentase
1	0-4 Tahun	21.595	9,59 %
2	5-19 Tahun	66.771	29,63%
3	20-59 Tahun	121.886	54,10%
4	>59 Tahun	15.046	6,68%
Jumlah		225.298	100%

Sumber: Badan Pusat Statitik Kabupaten Karimun 2015

Tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Karimun mencapai 148 jiwa per Km² dengan penduduk tertinggi terjadi di Kecamatan Karimun mencapai 747 jiwa per Km² dan tingkat penduduk terendah terdapat di kabupaten Moro dengan kepadatan sebesar 41 jiwa per Km² (Karimunkab, 2016). Adapun jumlah kepadatan penduduk di setiap kecamatan yang ada di kabupaten Karimun ialah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten Karimun Tahun 2015

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas (Km ²)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
1	Karimun	44.666	59,76	747
2	Meral	38.831	57,85	671
3	Tebing	24.415	76,35	320
4	Meral Barat	12.107	61,55	197
5	Kundur	29.681	83,74	354
6	Kundur Utara	11.751	245,65	48
7	Kundur Barat	17.359	189,92	91
8	Moro	18.348	447,92	41
9	Durai	6.472	62,98	103
10	Buru	9.462	73,40	129
11	Belat	6.646	109,34	61
12	Ungar	6.128	55,53	110
Jumlah		225.866	1.524	148

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Karimun Tahun 2015

2.1.3 Visi dan Misi Kabupaten Karimun

Visi Kabupaten Karimun:

“Terwujudnya Kabupaten Karimun sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim yang Terdepan Berlandaskan Iman dan Taqwa”

Misi Kabupaten Karimun:

1. Pusat pertumbuhan melalui KPBPB
2. Ekonomi kerakyatan berbasis maritime dan pertanian
3. Penguatan konektivitas dan pemerataan pembangunan
4. SDM cerdas, sehat, kompetitif, menjawab kebutuhan
5. Kelestarian lingkungan hidup
6. Berbudaya berlandaskan iman dan taqwa
7. Birokrasi profesional, bersih melayani

2.1.4 Profil Perdagangan Bebas Kabupaten Karimun

Berdasarkan aspek geografisnya, maka Kabupaten Karimun menjadi salah satu empat kabupaten yang sebagian wilayahnya ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB atau *Free Trade Zone/FTZ*). Kegiatan industri di Kabupaten Karimun yang potensial dikembangkan dapat dibagi menjadi dua yaitu KPBPB dan diluar KPBPB (BP Karimun, 2018).

Karimun merupakan salah satu kawasan strategis nasional di Provinsi Kepulauan Riau yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan bebas (KPBPB) disamping Batam dan Bintan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 yang merupakan salah satu model implementasi dari berbagai bentuk kebijakan pemerintah tentang Kawasan Strategis Nasional. penegasan Karimun menjadi KPPB atau *Free Trade Zone (FTZ)* dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 20017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun, dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan perkembangan daerah melalui peningkatan penanaman modal (investasi) baik dari dalam maupun luar negeri (PMDN dan PMA) dengan mempersiapkan kawasan yang memiliki keunggulan geo-ekonomi dan geo-strategis (BP Karimun).

Letak Karimun yang strageis pada salah satu jalur perdagangan internasional (Selat Malaka), sangat memungkinkan kawasan ini berkembang menjadi salah satu pintu gerbang dan ujung tombak pertumbuhan ekonomi Indonesia (makro ekonomi) di masa mendatang. Letak yang strategis ini yang menjadi pertimbangan utama pemerintah menetapkan kawasan karimun sebagai KPBPB.

Kawasan PBPB Karimun hanya mencakup sebagian wilayah Kabupaten Karimun yakni meliputi sebagian Pulau Karimun Besar dan seluruh Pulau Karimun Kecil dengan luas 9.666.018 Ha, dengan rincian Pulau Karimun Besar seluas 8.862.018 Ha dan Pulau Karimun Kecil seluas 804 Ha.



Gambar 2.2 Peta Kawasan PBPB Karimun

Sumber: BP Karimun, 2017

Jika dilihat berdasarkan potensi lahan yang dimiliki, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun terbagi menjadi beberapa kawasan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Potensi Lahan KPBPB Karimun

No	Nama kawasan	Luas kawasan (Ha)
1	Kawasan Hutan Lindung	1.964,81
2	Kawasan Stadion	10,108
3	Kawasan Konservasi	19,082
4	Kawasan Pariwisata	304
5	Kawasan Pelabuhan	167
6	Kawasan Pemukiman	437
7	Kawasan Industri	6764,018
	Jumlah	9.666,018

Sumber: BP Karimun, 2018

2.2 Gambaran Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun (BPKPBPB)

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Kabupaten Karimun ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun. Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dikelola oleh suatu badan yang disebut Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKPBPB) sebagaimana yang disebutkan didalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. BPKPBPB Kabupaten Karimun disebut dengan Badan Pengusahaan Karimun sebagaimana yang ditetapkan didalam Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun.

2.2.1 Tugas dan Fungsi Badan Pengusahaan Karimun

Badan Pengusahaan Karimun merupakan Lembaga Non Struktural (LNS) yang dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Kawasan. Adapun tugas dan fungsi Badan Pengusahaan Karimun adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Badan Pengusahaan Karimun mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan perdagangan Bebas dan pelabuhan bebas Karimun sesuai dengan fungsi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Uraian tugas Badan perusahaan Karimun ialah sebagai berikut:

- a. Pengelolaan dan pembangunan sesuai dengan fungsi-fungsi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, serta melaksanakan percepatan pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sehingga mampu bersaing dengan kawasan sejenis di negara lain.
- b. Melakukan kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi, seperti sektor industri, maritim, perdagangan, perhubungan, perbankan, pariwisata, dan bidang lainnya.
- c. Pengembangan ekonomi sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun serta Rencana Tata Ruang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun.
- d. Memproses perizinan usaha yang telah dilimpahkan kewenangannya kepada Badan Pengusahaan Karimun sesuai dengan peraturan perundangan.

2. Fungsi

- a. Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas di bidang umum, administrasi, kepegawaian, perencanaan dan data, keuangan, akuntansi dan pelaporan, serta hukum dan humas.
- b. Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas dibidang penanaman modal, perizinan usaha, pemasaran, serta pengawasan dan pengendalian.
- c. Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas dibidang pembangunan, pemeliharaan, pengelolaan lahan dan tata ruang, listrik, air dan limbah, serta lalu lintas barang.
- d. Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas dibidang pemeriksaan, penyusunan laporan, tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan pengawasan internal.

2.2.2 Struktur Organisasi Badan Pengusahaan Karimun

Struktur organisasi Badan Pengusahaan Karimun sebagaimana yang ditetapkan didalam Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun Nomor 2 Tahun 2008 ialah sebagai berikut :

1. Kepala Badan Pengusahaan Karimun
2. Wakil Kepala Badan Pengusahaan Karimun
3. Anggota (1) Administrasi dan Penyusunan Program, membawahi:
 - a. Bidang perencanaan
 - b. Bidang kepegawaian
 - c. Bidang keuangan
 - d. Bidang Hukum dan Humas
 - e. Bidang administrasi dan Umum

- f. Bidang Pengelolaan Data dan Informasi.
4. Anggota (2) Pelayanan Terpadu, membawahi:
- a. Bidang Perindag dan Penanaman Modal;
 - b. Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industri;
 - c. Bidang Kepariwisataaan dan Perizinan Tertentu;
 - d. Bidang Pengamanan Investasi dan Aset;
 - e. Bidang Pemasaran.
5. Anggota (3) Bina Sarana dan Prasarana, membawahi:
- a. Bidang Pembangunan
 - b. Bidang Pengelolaan Lahan
 - c. Bidang Pengelolaan Listrik, Air dan Limbah
 - d. Bidang Pengelolaan Bandar Udara, Pelabuhan laut dan Perhubungan Darat.
6. Anggota (4) Pengendalian, membawahi:
- a. Bidang Perizinan
 - b. Bidang Perencanaan dan Teknik
 - c. Bidang Organisasi dan Kinerja
 - d. Bidang Keuangan
 - e. Bidang Pengendalian Pembangunan.

2.2.3 Visi dan Misi Badan Pengusahaan Karimun

Berdasarkan tugas dan fungsi pembentukan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun, maka dibentuklah visi dan misi sebagai pedoman dalam membuat program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 tahun. Adapun visi Badan Pengusahaan Karimun ialah “Mewujudkan BP Karimun

sebagai Pengelola Kawasan Industri Maritim Kelas Dunia” (Renstra BP Karimun Tahun 2013-2017).

Adapun misi yang dijalankan dalam untuk mencapai visi diatas ialah sebagai berikut:

1. Mengembangkan kelembagaan yang professional
2. Menyediakan jasa alih kapal kelas dunia yang terintegrasi dengan pelabuhan internasional
3. Menjadikan kawasan industri maritim dan perdagangan yang berdaya saing internasional
4. Menjadikan daerah tujuan wisata kelas dunia berbasis budaya lokal.

2.2.4 Program dan kegiatan Badan Pengusahaan Karimun

Badan Pengusahaan Karimun membuat program dan kegiatan dalam jangka waktu lima tahun sebagai langkah untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan tersebut terdiri dari:

A. Program Generik:

Pengembangan dan peningkatan kelembagaan, aparatur/sumber daya manusia, terdiri dari kegiatan sebagai berikut:

- a. Peningkatan kapasitas unit bidang-bidang PBPB Karimun
- b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di Badan Pengusahaan.
- c. Peningkatan fasilitas kerja, sarana dan prasarana kerja lainnya
- d. Peningkatan kualitas kehumasan dalam rangka membangun pencitraan BPK PBPB Karimun dimata internasional.

B. Program Teknis:

1. Program aspek kepastian hukum dan fasilitas insentif, dengan kegiatan prioritas sebagai berikut:
 - a. Peningkatan sistem informasi data perencanaan kawasan PBPB.
 - b. Peningkatan kerja sama lembaga Pendidikan, Badan hukum dalam kajian aspek hukum pengembangan FTZ BP Karimun.
 - c. Studi insentif terhadap sektor-sektor industry manufaktur untuk menarik investor asing ke kawasan BP Karimun.
2. Program pengembangan dan peningkatan pelabuhan/alih kapal skala internasional, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan parit rampak dan malarko menuju kelas dunia.
 - b. Studi penataan sistem dan manajemen pelabuhan.
 - c. Studi penataan manajemen pelabuhan.
 - d. Menyusun Master Plan, DED, Amdal, dan Bisnis Plan Pelabuhan.
 - e. Pembebasan, pematangan, perluasan dan pembangunan pelabuhan.
 - f. Studi desain sistem MCS dan Pembangunan sistem MCS.
 - g. Studi desain sistem untuk peningkatan efisiensi pelayanan pelabuhan.
3. Program pengembangan dan peningkatan infrastruktur kawasan BPK Karimun, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyusunan Detail Engineering Design (DED) jaringan jalan, AMDAL.
 - b. Jaringan jalan kolektor primer 1: Jalan Tanjung Balai-Meral-Parit Rempak-Parit Benut-SP Telujung-Pasir Panjang

- c. Jaringan jalan kolektor primer 1: Jalan Parit Rempak-Pelabuhan Roro
- d. Jaringan jalan kolektor primer 1: Jalan Sungai Pasir-Teluk Ranai-Teluk Sitimbut
- e. Jaringan jalan kolektor primer 1: Jalan Pasir Panjang-Pelambung-Mentuda-Tanjung Balai
- f. Jaringan jalan kolektor primer 1: Jalan Sp. Jelutung- Teluk Ranai
- g. Pengembangan dan peningkatan pelabuhan penyeberangan lintas antar provinsi dan antar Negara di pelabuhan Tanjung Balai Karimun dan Pelabuhan Tanjung Tiram
- h. Pengembangan dan peningkatan pelabuhan penyeberangan lintas antar kabupaten/ kota di pelabuhan Parit rempak
- i. Lintas penyeberangan antara negara di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun dan Pelabuhan Tanjung Tiram menuju negara lain
- j. Lintas penyeberangan antar provinsi di pelabuhan Tanjung Balai Karimun menuju provinsi lain
- k. Lintas angkutan penyeberangan antar kabupaten/kota di pelabuhan Tanjung Balai karimun menuju kabupaten/kota lain
- l. Pengembangan dan peningkatan alur pelayaran nasional yang menghubungkan pelabuhan Tanjung Balai Karimun dan pelabuhan nasional lainnya.
- m. Pengembangan dan peningkatan alur pelayaran internasional yang menghubungkan terminal parit rempak dan terminal malarko dengan alur pelayaran internasional di Selat Malaka dan Selat Singapura.

- n. Pengembangan dan peningkatan fasilitas penyimpanan berupa depo minyak bumi
- o. Pengembangan dan peningkatan jaringan pipa gas bumi terdiri atas jaringan pipa gas hulu perpipaan bawah laut yang terhubung menerus antara pulau sumatera, kawasan BBK, kawasan Johor Bahru, Malaysia dan Negara Singapura.
- p. Pengembangan dan peningkatan jaringan energy listrik meliputi SUTT yang menghubungkan tiap-tiap GI (Gardu Induk) di Pulau Karimun
- q. Pengembangan dan peningkatan jaringan air bersih waduk yang meliputi Waduk Sungai Gunung Jantan, Waduk Sungai Pongkar, Waduk Sungai Bati, Waduk Sentani di Sungai Ambat
- r. Pengembangan dan peningkatan unit air baku yang dipasok dari Waduk Sungai Bati, Waduk Sungai Pongkar, Waduk Sungai Gunung Jantan, dan Waduk Sentani sistem pengendalian banjir berupa Waduk Sungai Gunung Jantan, Waduk Sungai Pongkar, Waduk Sungai Bati, Waduk Sentani di Sungai Ambat.
- s. Pengembangan dan peningkatan Unit Produksi UP air minum Sungai Bati, UP air minum Sungai Pongkar, UP air minum Sungai Gunung Jantan, dan UP air minum Sentani
- t. Pengembangan dan peningkatan sistem pengamanan pantai pada pantai yang rawan abrasi
- u. Pengembangan dan peningkatan STO dan jaringan teresterial dan satelit

- v. Pengembangan dan peningkatan sistem jaringan drainase berupa saluran drainase primer, IPAL, tempat penampungan sementara limbah B3, TPA sememal Desa pangke
4. Program pengembangan dan peningkatan pusat-pusat industry, perkapalan, perdagangan dan jasa (CBD) dan pemukiman di kawasan BPK Karimun, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyusunan rencana detail tata ruang seluruh kecamatan di Karimun
 - b. Penyusunan masterplan dan bisnis BP Karimun
 - c. Pembangunan kawasan Central Bussines District (CBD) di Karimun
 5. Program pengembangan dan peningkatan pariwisata, Pendidikan dan pertahanan dan keamanan kawasan BPK Karimun, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyusunan masterplan pariwisata dan destinasi-destinasi alami baru yang belum tereksplorasi
 - b. Peningkatan kerja sama kelembagaan Pendidikan, lembaga penelitian, dan asosiasi pariwisata di kawasan BP Karimun
 - c. Pengembangan dan peningkatan kawasan pertahanan dan keamanan pulau-pulau terdepan diwilayah Republik Indonesia

2.2.5 Kepegawaian Pengusahaan Karimun

Berdasarkan struktur organisasi dan personil yang bekerja di Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun, jumlah pegawai yang bekerja di BP Karimun secara keseluruhan berjumlah 38 orang. Dari keseluruhan jumlah pegawai 11 orang diantaranya merupakan pegawai negeri sipil, 4 orang berasal dari tenaga kerja honorer, dan 23 orang lainnya berstatus non PNS

(Laporan kerja BP Karimun, 2017). Adapun jumlah pegawai BP Karimun berdasarkan jabatan ialah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Jumlah Pegawai BP Karimun berdasarkan Jabatan Tahun 2017

No	Jabatan	Jumlah(Orang)
1	Ketua	1
2	Wakil ketua	1
3	Anggota	4
4	Ka. Pengawasan (SPI)	1
5	Kepala Bidang/ Plt	13
6	Staff	18
	Jumlah	38

Sumber: Badan Pengusahaan Karimun, 2017

Adapun sumber daya manusia dari Badan Pengusahaan Karimun berdasarkan tingkat Pendidikan ialah sebagai berikut:

Tabel 2.7
Jumlah Pegawai BP Karimun Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2017

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah
1	Doktor (S3)	1
2	Magister (S2)	6
3	Sarjana (S1)	18
4	Diploma (D3)	1
5	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas(SLTA)	11
6	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama(SLTP)	1
7	Sekolah Dasar	-
	Jumlah	38

Sumber: BP Karimun, 2017